

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	1
Laporan Realisasi Anggaran.....	...
Neraca
Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB I Pendahuluan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	...
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	...
- BAB VI Penjelasan Tambahan
Lampiran – lampiran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Inspektorat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 31 Desember 2014

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

SUYANTO, SH, MM
NIP. 19590930 198603 1 008

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 5.425.554.563,00 atau mencapai 90.93% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.841.158.890,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1.028.000,00, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00, aset tetap sebesar Rp. 1.830.910.890,00, dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 9.220.000,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.841.158.890,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 1.028.000,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 1.840.130.890,00, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0,00.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi tentang penjelasan nos-nos laporan

- b. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- c. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai 5 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp 5.966.691.000, 00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	5.826.747.000,00
2	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	139.944.000,00
	Surplus/(Defisit)	5.966.691.000,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 Nomor 9 tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.966.691.000,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 5.966.691.000,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100)$
2	Belanja	5.966.691.000,00	5.425.554.563,00	0,00
	- <i>Belanja Operasi</i>	5.826.747.000,00	5.292.929.563,00	0,00
	- <i>Belanja Modal</i>	139.944.000,00	132.625.000,00	0,00
	- <i>Belanja Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	5.966.691.000,00	5.425.554.563,00	0,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 5.425.554.563,00 atau 90,93 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.541.136.437,00 atau 9,07 persen. Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	2.479.541.000,00	2.262.966.506,00	91,26
2	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	580.498.300,00	566.733.453,00	97,63
3	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	241.301.700,00	208.472.874,00	86,40
4	Pendidikan dan pelatihan formal	271.500.000,00	210.230.000,00	77,43
5	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	868.500.000	843.580.000,00	97,13
6	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	286.605.000,00	268.142.500,00	93,56
7	Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kabupaten Blitar	80.800.000,00	77.140.000,00	94,30
8	Inventarisasi, Pelaporan, dan Pemutakhiran data hasil pemeriksaan	38.500.000,00	33.419.230,00	86,80
9	Reviu laporan keuangan pemerintah daerah	40.430.000,00	37.380.000,00	92,46
10	Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	56.800.000,00	56.790.000,00	99,98
11	Pengendalian disiplin aparatur	9.820.000,00	9.820.000,00	100
12	Evaluasi LAKIP SKPD	12.600.000,00	12.500.000,00	99,21
13	Pengawasan dalam rangka proses pengadaan CPNSD	26.515.000,00	26.065.000,00	98,30
14	Pelaksanaan pengawasan khusus di lingkungan pemerintah daerah	103.980.000,00	12.620.000,00	12,14
15	Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa	152.200.000,00	150.600.000,00	98,95
16	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan	71.480.000,00	9.175.000,00	12,84
17	Workshop perundang-undangan	125.900.000,00	125.800.000,00	99,92
18	Peningkatan kapasitas aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar	338.720.000,00	334.120.000,00	98,64
19	Pembinaan dan sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 bagi kepala SKPD	180.000.000,00	180.000.000,00	100
	Total	5.066.601,00	5.125.551.563,00	100,02

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Kurangnya jumlah aparat fungsional di Inspektorat Kabupaten Blitar;
- b. Perubahan struktur organisasi di Inspektorat, adanya struktur fungsional dan struktural yang baru diaplikasikan pada tahun 2014;
- c. Keterlambatan Perbup tentang Tupoksi Inspektorat yang baru (baru terbit pada Bulan Mei 2014);

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis

rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan

a. Pengakuan

Pengakuan persediaan sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		(Rp)	(Rp)
a. Aset		1.841.158.890,00	1.698.402.890,00

Saldo Aset SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.841.158.890,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(1)	Aset Lancar	1.028.000,00	747.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	1.830.910.890,00	1.688.435.890,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	9.220.000,00	9.220.000,00
Jumlah Aset		1.841.158.890,00	1.698.402.890,00

		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar		1.028.000,00	747.000,00

Saldo Aset Lancar SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.028.000,00, dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Persediaan	1.028.000,00	747.000,00
Jumlah		1.028.000,00	747.000,00

		31 Desember 2014	31 Desember 2013
		(Rp)	(Rp)
(a) Persediaan		1.028.000,00	747.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	673.000,00
(2)	Persediaan map	175.000,00
(3)	Persediaan amplop	150.000,00
(4)	Persediaan benda pos	30.000,00
	Jumlah	1.028.000,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
2) Aset Tetap	1.830.910.890,00	1.688.435.890,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.688.435.890,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.830.910.890,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Tanah	0,00	0,00
(b)	Peralatan dan Mesin	1.715.022.390,00	1.572.547.390,00
(c)	Gedung dan Bangunan	46.125.000,00	46.125.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.723.500,00	69.723.500,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	40.000,00	40.000,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset	1.830.910.890,00	1.688.435.890,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2014 sebesar 142.475.000,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp. 1.830.910.890,00 – Rp. 1.688.435.890,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
(a) Peralatan dan Mesin	1.715.022.390,00	1.572.547.390,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.715.022.390,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi asset tetap 2014*

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **Rp. 1.572.547.390,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai	1.025.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	131.600.000,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	9.850.000,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan	142.475.000,00	

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014 **Rp. 1.715.022.390,00**

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(b) Gedung dan Bangunan	<u>46.125.000,00</u>	<u>46.125.000,00</u>

Saldo gedung dan bangunan SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 46.125.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **46.125.000,00**

Penambahan Gedung dan Bangunan

Jasa		
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan	0,00	
Pengurangan Gedung dan Bangunan		
Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		46.125.000,00

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2010</u>
	(Rp)	(Rp)
(c) Jalan, Jaringan dan Instalasi	69.723.500,00	69.723.500,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 69.723.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **69.723.500,00**

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	0,00

Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan	0,00	
Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi		
Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00)	+
Jumlah Pengurangan	(0,00)	+
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		69.723.500,00

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2010</u>
	(Rp)	(Rp)
(d) Aset Tetap Lainnya	40.000,00	40.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 40.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **40.000,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	0,00
Hibah	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi	0,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		40.000,00

Rincian perolehan aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(e) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
3) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar *Nihil*.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
4) Aset Lainnya	9.220.000,00	9.220.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 9.220.000,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 9.220.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Aset Lain-lain	9.220.000,00	9.220.000,00
	Jumlah Aset	9.220.000,00	9.220.000,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp. 9.220.000,00 – Rp. 9.220.000,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	9.220.000,00	9.220.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 9.220.000,00, terdiri dari (*Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 9.220.000,00*), dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **9.220.000,00**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Modal	0,00
Hibah	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi	0,00 +
Jumlah penambahan	0,00

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan	(0,00)
Mutasi	(0,00)
Hibah	(0,00)
Reklasifikasi	(0,00)

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp. 9.220.000,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	Mesin Ketik	420.000	-
2	Monitor	800.000	-
3	Printer	3.200.000	-
4	CPU	4.200.000	-
Jumlah		9.220.000,00	0,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 adalah sebesar *nihil*.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	<i>Nihil</i>	0,00
Jumlah Hutang		0,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar *nihil*.

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
c. Ekuitas Dana	1.841.158.890,00	1.698.402.890,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	1.028.000,00	747.000,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.028.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	1.028.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		1.028.000,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	1.840.130.890,00	1.697.655.890,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.840.130.890,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.830.910.890,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9.220.000,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.840.130.890,00

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2014 serta realisasi Tahun Anggaran 2013, adalah *nihil*.

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
b. Belanja	5.966.691.000,00	4.957.202.400,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014 SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
1) Belanja Operasi	5.826.747.000,00	4.957.202.400,00

Belanja Operasi SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp. 5.292.929.563,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(a)	Belanja Pegawai	3.811.656.000,00	3.510.554.006,00	2.972.408.172,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	2.015.091.000,00	1.782.375.557,00	1.770.548.832,00
Jumlah		5.826.747.000,00	5.292.929.563,00	4.742.957.004,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar realisasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Tidak Langsung			

	Tambahan Penghasilan PNS	80.000.000,00	70.000.000,00	91.550.000,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	2.479.541.000,00	2.262.966.506,00	2.085.933.172,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	1.332.115.000,00	1.247.587.500,00	886.475.000,00
	Honorarium PNS	1.332.115.000,00	1.247.587.500,00	851.475.000,00
	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	35.000.000,00
	Belanja Barang/Jasa	2.015.091.000,00	1.782.375.557,00	1.770.548.832,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	97.454.500,00	96.852.400,00	82.682.200,00
	Belanja Bahan/Material	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00
	Belanja Jasa Kantor	60.350.000,00	48.183.478,00	53.241.331,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.557.700,00	48.597.874,00	50.877.186,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.695.000,00	48.462.255,00	43.910.705,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	2.424.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	91.175.000,00	84.869.500,00	58.010.000,00
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	230.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	830.273.800,00	707.310.050,00	1.248.658.410,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	775.525.000,00	715.200.000,00	205.100.000,00
	Belanja Pemeliharaan	13.240.000,00	13.080.000,00	13.195.000,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	3.487.150.000,00	3.162.588.057,00	2.750.298.832,00
	Jumlah 1 dan 2	5.966.691.000,00	5.425.554.563,00	4.836.232.004,00

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
2) Belanja Modal	139.944.000,00	93.375.000,00

Belanja Modal SKPD Inspektorat Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 Rp. 132.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Kertas	22.500.000,00	20.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.619.000,00	10.750.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79.825.000,00	75.375.000,00	62.075.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	3.400.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga	0,00	0,00	9.800.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	18.000.000,00
	Total Belanja Modal	139.944.000,00	132.625.000,00	93.275.000,00

BAB VI
PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD Inspektorat pada penyusunan Laporan Keuangan 2014 telah melakukan penyesuaian rekening asset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 untuk data neraca awal tahun 2014 sehingga asset tetap pada SIMDA dan SIMBADA dapat dibandingkan.

Proses perubahan Rekening Aset Tetap tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca Per 31 Desember 2013 (setelah Audit)
2. Hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara BPKAD dengan SKPD per 31 Desember 2013.
3. *Print Out* SIMBADA Rincian Barang Ke Neraca Tahun Anggaran 2013.

Adapun Berita Acara beserta Kertas Kerja penyesuaian rekening asset tetap terlampir

Blitar, 31 Desember 2014

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

SUYANTO, SH, MM

NIP. 19590930 198603 1 008

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Berita Acara Pemeriksaan Kas

LAMPIRAN II

Foto Copy Rekening Koran

LAMPIRAN III

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Barang Habis Pakai

LAMPIRAN IV

Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2014

LAMPIRAN V

Daftar Inventarisasi Aset Daerah Extra Komptabel Perolehan 2014

LAMPIRAN VI
RINCIAN MUTASI ASET TANAH 2014

LAMPIRAN VII

RINCIAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN 2014

LAMPIRAN VIII

RINCIAN MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

2014

LAMPIRAN IX
RINCIAN MUTASI ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN
IRIGASI 2014

LAMPIRAN X

RINCIAN MUTASI ASET TETAP LAINNYA 2014

LAMPIRAN X1

LAIN-LAIN:

- MEMO JURNAL PENYESUAIAN/KOREKSI**
- BUKTI PENYESUAIAN/KOREKSI**

LAMPIRAN XII

KERTAS KERJA MAPING SALDO AWAL 2014